



## Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Menggunakan Model CIPP pada UMKM Kota Pekanbaru

### Evaluation of the Implementation of Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) Using the CIPP Model in MSMEs of Pekanbaru City

Sinta Ramaiyanti<sup>1</sup>, Vera Oktari<sup>2</sup>, Lila Anggarini<sup>3</sup>, Mayla Khoriyah<sup>4</sup>, Nurrahma Dewi<sup>5</sup>, Fitri Humairoh<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Universitas Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pekanbaru, Indonesia

Email: \*[sinta.ramaiyanti@lecturer.unri.ac.id](mailto:sinta.ramaiyanti@lecturer.unri.ac.id)

#### Article Info

Article history:

Received: 19 September 2025

Accepted: 16 Desember 2025

Published: 20 Desember 2025

Keywords: *evaluation; implementation; financial accounting standard msmes; msmes*

DOI: [10.37859/jae.v15i2.10229](https://doi.org/10.37859/jae.v15i2.10229)

JEL Classification: M41; M48; L26

#### Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi implementasi SAK EMKM pada UMKM melalui pendekatan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Metode penelitian adalah penelitian kualitatif. Sampel dan lokasi penelitian yaitu 30 UMKM di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data adalah wawancara semi terstruktur dengan pemilik/penanggung jawab keuangan. Kriteria UMKM melalui teknik *Purposive Sampling* yaitu UMKM yang telah berdiri minimal 2 tahun. Hasil penelitian bahwa pada aspek context, pelaku UMKM memiliki kesadaran tinggi mengenai urgensi pencatatan sebagai instrumen vital dalam memantau kinerja usaha. Pada aspek input, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, dan terbatasnya infrastruktur pencatatan menjadi kendala utama. Pada aspek product, ditemukan dampak positif yang mendorong optimism sehingga disimpulkan bahwa motivasi adopsi SAK EMKM dikalangan UMKM Pekanbaru cukup tinggi.

This study evaluates the implementation of SAK EMKM in MSMEs using the CIPP model approach (Context, Input, Process, Product). The research method employed is qualitative research. The sample and research location consist of 30 MSMEs in Pekanbaru City. Data were collected through semi-structured interviews with the owners or those responsible for financial management. The criteria for selecting MSMEs, using purposive sampling, were businesses that had been operating for at least two years. The findings show that in the context aspect, MSME practitioners have a high awareness of the urgency of financial recording as a vital instrument for monitoring business performance. In the input aspect, limitations in human resources, lack of training, and inadequate recording infrastructure were identified as major obstacles. In the product aspect, positive impacts were found that foster optimism. Thus, it can be concluded that the motivation to adopt SAK EMKM among MSMEs in Pekanbaru is relatively high.

## PENDAHULUAN

Dalam setiap pelaksanaan kebijakan atau program, terdapat kebutuhan mendasar bagi institusi untuk secara berkala meninjau proses dan efektivitasnya. Tindakan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk mekanisme pengendalian yang strategis dalam menjamin keberlanjutan serta peningkatan mutu program secara sistematis (Rossi, et al., 2019). Evaluasi bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan instrumen kontrol strategis yang memfasilitasi umpan balik berkelanjutan guna menjaga kualitas dan keberlanjutan program (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Evaluasi reflektif yang berkualitas memungkinkan pemetaan atas capaian program, dinamika pelaksanaan, dan mekanisme transformatif yang menghubungkan antara desain normatif dan realitas implementatif yang kompleks (Gugiu, C. P., & Rodriguez-Campos, L., 2020; Alkin & Vo, 2018).

Dalam bidang ekonomi daerah, UMKM berfungsi sebagai penyangga perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap PDB mencapai lebih dari 60% serta penyerapan tenaga kerja sebesar 97% (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Pekanbaru sebagai pusat ekonomi Provinsi Riau menampilkan karakteristik UMKM yang beragam, mulai dari perdagangan, kuliner, jasa hingga industri kreatif (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, 2022). Meskipun aktivitas ekonomi UMKM sangat tinggi, praktik tata kelola usaha masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai standar (Tambunan, 2019). Sebagian besar UMKM di Pekanbaru masih menggunakan metode pencatatan informal yang bersifat manual, intuitif, dan sering kali tidak mencerminkan kondisi finansial usaha yang sebenarnya (Rohmannisa, 2024).

Ketiadaan laporan keuangan yang kredibel membatasi akses pembiayaan, menghambat pengambilan keputusan yang berbasis data, serta memperlemah posisi tawar UMKM dalam ekosistem bisnis formal. Untuk menjawab tantangan ini, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang disahkan pada tahun 2016. SAK EMKM dirancang agar mudah diterapkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil dengan struktur pelaporan sederhana yang terdiri laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2016). Dengan menggunakan basis kas dan terminologi yang disederhanakan, standar ini diharapkan dapat diadopsi secara luas oleh UMKM Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas usaha mereka (Pakaya et al., 2024). Penerapan standar ini juga sejalan dengan kebutuhan nasional untuk menciptakan tata kelola keuangan UMKM yang terdokumentasi, akuntabel, dan siap bersaing secara terbuka di era ekonomi digital. Namun, realitas menunjukkan bahwa adopsi SAK EMKM masih sangat terbatas di kalangan pelaku UMKM.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa implementasi SAK EMKM di kalangan UMKM masih menghadapi sejumlah kendala. Khaidir (2021) menemukan bahwa rendahnya pemahaman akuntansi, keterbatasan waktu, dan absennya SDM akuntansi menjadi penyebab utama UMKM tidak menyusun laporan keuangan sesuai standar. Selain itu, terdapat temuan bahwa banyak laporan keuangan UMKM tidak memenuhi aspek teknis standar seperti pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan informasi keuangan (Pangestu et al., 2019). Fenomena ini diperparah oleh lemahnya sistem monitoring, terbatasnya sosialisasi yang bersifat berkelanjutan, dan absennya perangkat evaluasi program yang bersifat menyeluruh dan adaptif.

Kesenjangan antara regulasi dan praktik ini terjadi meskipun terdapat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 99 Tahun 2022 yang secara tegas menempatkan penguatan pencatatan dan pelaporan keuangan sebagai strategi utama pemberdayaan UMKM. Hingga kini, belum tersedia kerangka evaluasi yang secara sistemik dapat menilai efektivitas penerapan SAK EMKM khususnya dalam konteks perkotaan seperti Pekanbaru yang memiliki diversifikasi pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi yang lebih holistik dan kontekstual terhadap dinamika implementasi standar ini agar penyusunan kebijakan penguatan UMKM

tidak bersifat normatif semata, melainkan berbasis bukti lapangan yang solid. Lebih lanjut, pendekatan evaluasi terhadap program UMKM tidak hanya bermanfaat sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran organisasi yang mendalam (Mark, Henry, & Julnes, 2000). Evaluasi memainkan peran penting dalam mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan, area yang membutuhkan perbaikan, serta perumusan strategi intervensi yang kontekstual dan berbasis bukti.

Untuk itu, diperlukan sebuah pendekatan evaluasi program yang tidak hanya menilai output, tetapi juga memperhitungkan konteks kebutuhan, kesiapan sumber daya, dinamika pelaksanaan, dan hasil aktual di lapangan. Model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) memberikan kerangka analisis komprehensif yang dapat mengevaluasi secara menyeluruh dimensi keberhasilan maupun hambatan dari implementasi sebuah kebijakan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Arikunto & Jabar (2010) juga menegaskan bahwa model ini sangat sesuai digunakan untuk mengevaluasi program pembangunan yang kompleks dan multisektor.

Penelitian mengenai implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) telah dilakukan secara luas sejak diperkenalkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2016. Namun demikian, sebagian besar studi sebelumnya hanya menekankan pada evaluasi aspek parsial seperti pemahaman akuntansi pelaku UMKM, latar belakang pendidikan, atau tingkat kepatuhan, tanpa menggunakan pendekatan evaluasi program yang menyeluruh dan sistematis. Salah satu studi yang relevan adalah penelitian Khadijah & Purba (2021) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di kalangan UMKM masih bersifat tradisional dan minim penggunaan sistem akuntansi berbasis standar.

Pelaku UMKM cenderung tidak memahami prinsip dasar akuntansi dan tidak memiliki pembukuan yang memadai, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Studi lainnya oleh Arlita, et al (2023) berjudul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah pada UMKM Warung Sarapan Pagi Supiah Kecamatan Limapuluh Pekanbaru, menemukan bahwa penerapan SAK EMKM pada tingkat mikro masih sangat terbatas. Pelaku usaha memahami pentingnya pencatatan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai standar karena tidak adanya pendampingan intensif dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, Pakaya et al. (2024) mencatat bahwa adopsi SAK EMKM di Gorontalo berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM, namun keberhasilan tersebut sangat bergantung pada pelatihan dan latar belakang pendidikan pelaku usaha. Penelitian Pangestu et al. (2019) di Samarinda juga menemukan ketidaksesuaian dalam pengukuran dan pengungkapan laporan keuangan karena rendahnya pemahaman akuntansi. Studi Khaidir (2021) memperkuat temuan bahwa persepsi terhadap kerumitan standar, kurangnya sosialisasi, serta minimnya SDM menjadi kendala utama dalam implementasi. Namun, hampir seluruh penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam hubungan antara konteks kebijakan, kesiapan input, proses implementasi, dan hasil akhir secara terpadu. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan evaluasi model CIPP (Context, Input, Process, Product) secara menyeluruh yang memungkinkan eksplorasi holistik terhadap keberhasilan maupun hambatan dalam penerapan SAK EMKM. Berbeda dari studi sebelumnya yang hanya melihat aspek teknis atau deskriptif, penelitian ini menyoroti dinamika program secara lintas sektor di Kota Pekanbaru, dengan fokus pada inisiatif pelaku UMKM itu sendiri, bukan hanya dari sisi program pemerintah.

Sejumlah penelitian empiris tentang penerapan SAK EMKM pada UMKM menunjukkan temuan yang konsisten namun cenderung bersifat parsial. Khaidir (2021) menemukan bahwa penerapan SAK EMKM di Pekanbaru belum efektif karena rendahnya pemahaman dan keterbatasan SDM pada pelaku UMKM, sehingga praktik pembukuan masih tradisional dan tidak sesuai standar. Studi yang dilakukan Khadijah & Purba (2021) juga menegaskan

lemahnya pengelolaan keuangan UMKM dan pencatatan formal yang sering tidak konsisten, sehingga kualitas informasi keuangan yang dihasilkan belum memadai untuk pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Pangestu., et.al (2019) melaporkan ketidaksesuaian teknis pelaporan UMKM terhadap ketentuan SAK EMKM, serta kendala sosialisasi dan monitoring. Di sisi lain, studi kasus Arlita, et.all (2023) menunjukkan bahwa meskipun pelaku usaha menyadari pentingnya pencatatan, implementasi standar belum berjalan karena keterbatasan pengetahuan dan minimnya pendampingan. Sementara itu, penelitian Pakaya et al. (2024) mengindikasikan bahwa pelatihan intensif dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada UMKM yang menerapkan SAK EMKM, tetapi keberhasilan sangat bergantung pada adanya dukungan pelatihan dan infrastruktur digital.

Banyak studi yang menelaah **satu atau hanya beberapa aspek** penerapan SAK EMKM namun jarang yang mengadopsi kerangka evaluasi program yang menyeluruh. Penelitian ini menerapkan model CIPP untuk menilai kesiapan, mekanisme pelaksanaan, hambatan, dan hasil riil penerapan SAK EMKM di Pekanbaru. Evaluasi komprehensif dengan menggunakan model CIPP dapat memberikan pandangan dari berbagai aspek secara utuh dan ditindaklanjuti bagi pembuat kebijakan serta praktisi pendampingan. Evaluasi dengan model CIPP belum pernah dipakai dalam penelitian terdahulu, sehingga dapat menghasilkan kontribusi teoritis yang menggunakan kerangka analitik baru dan dapat direplikasi pada objek di kota lainnya. Penelitian ini dapat memberikan bukti gambaran realita dilapangan tentang kesadaran, hambatan dan proses yang diperlukan pelaku UMKM terhadap pencatatan keuangan sehingga dapat dijadikan rekomendasi kebijakan.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007). Adapun sampel dan lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu 30 UMKM di Kota Pekanbaru dari berbagai sektor. Informan Utama dalam penelitian ini adalah Pemilik atau Penanggung Jawab Keuangan dari 30 UMKM di Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dengan pemilik/penanggung jawab keuangan. Hasil rekaman wawancara ditranskrip dan dianalisis per kasus sebelumnya. Dalam mengumpulkan data yang akurat, maka peneliti memilih informan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dengan kriteria UMKM yang telah berdiri minimal 2 tahun.

Pendekatan penelitian menggunakan model evaluasi CIPP yang terdiri dari empat dimensi. Tabel berikut menyajikan pemetaan model evaluasi CIPP.

**Tabel 1. Kerangka Analitik Model CIPP**

Komponen	Fokus Evaluasi
Komponen Context bertujuan menilai kebutuhan, masalah, serta kondisi lingkungan yang melatarbelakangi perlunya suatu program (Stufflebeam, 2003)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran pentingnya pencatatan (Tambunan; 2019 dan Pakaya et. al; 2024)</li> <li>• Pengetahuan SAK EMKM (Khaidir; 2021 dan Pangestu et. Al; 2019)</li> <li>• Motivasi adopsi (Pakaya et.al, 2024)</li> </ul>

Komponen Input menilai kecukupan sumber daya, kapasitas, dan strategi yang tersedia untuk mendukung implementasi program (Stufflebeam, 2003).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM Keuangan/Kompetensi pencatatan (Khadijah &amp; Purba; 2021 &amp; Pangestu et al; 2019).</li> <li>• Pelatihan/Pengalaman (Pakaya et al; 2024).</li> <li>• Perangkat &amp; Aplikasi (Rohmannisa; 2024)</li> </ul>
Komponen Process Menilai bagaimana program dijalankan, hambatan yang muncul dan evaluasi pelaksanaan sesuai rencana (Stufflebeam, 2003).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan/Cara mencatat (Arlita et al.; 2023)</li> <li>• Hambatan/Kendala Teknis (Pangestu et al.; 2019)</li> <li>• Pendampingan (Pakaya et al.; 2024)</li> </ul>
Komponen Product mengevaluasi keluaran, hasil dan manfaat program (Stufflebeam, 2003).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan sederhana yang dihasilkan (Arlita et al; 2023 dan Pangestu et al.; 2019)</li> <li>• Kesiapan mengadopsi SAK EMKM (Tambunan; 2019 &amp; Rohmannisa; 2024)</li> </ul>

Teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015), yaitu melalui empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pada tahap pertama, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pemilik atau penanggung jawab keuangan pada 30 UMKM. Seluruh rekaman wawancara kemudian ditranskrip dan dipetakan sesuai komponen evaluasi CIPP, yakni context, input, process, dan product. Proses ini menghasilkan kumpulan data mentah berupa pernyataan dan penjelasan terkait. Tahap kedua adalah reduksi data, yaitu proses penyederhanaan dan pengorganisasian informasi dari transkrip agar fokus pada temuan inti. Sehingga data yang semula tidak teratur dapat disusun secara sistematis ke dalam empat komponen CIPP. Reduksi data ini menjadi langkah untuk membedakan informasi relevan dan tidak relevan. Tahap ketiga adalah penyajian data (data display). Pada tahap ini, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk tabel lintas kasus dan ringkasan kategori sesuai komponen CIPP untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Penyajian data ini membantu menilai hubungan antar variabel, mengidentifikasi kecenderungan umum, sekaligus mengenali pengecualian yang muncul di beberapa kasus.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menginterpretasikan pola temuan yang telah tersusun pada tahap sebelumnya. Penarikan kesimpulan berdasarkan pola, kecenderungan dan ketidaksesuaian antar UMKM. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi metodologis dengan membandingkan jawaban antar informan. Karena sumber data penelitian relatif homogen yakni pemilik/penanggung jawab keuangan UMKM. Triangulasi metodologis memungkinkan dalam mengidentifikasi pola berulang dalam lintas kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik analisis data mengacu pada pendapat Miles & Huberman (1994), yang terdiri dari empat tahapan utama.

### 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 30 UMKM di Pekanbaru yang mewakili berbagai sektor (F&B, ritel, jasa, manufaktur ringan, pertanian urban, dll.). Wawancara difokuskan pada pengalaman, hambatan, dan kesiapan mereka dalam mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Seluruh transkrip wawancara dibersihkan, kemudian dipetakan menggunakan kerangka CIPP (Context, Input, Process, Product).

### 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dari hasil wawancara yang diperoleh dilakukan penyederhanaan data dengan melakukan penyederhanaan, pengorganisir agar dapat dipahami. Temuan utama berdasarkan aspek CIPP adalah sebagai berikut:

- Evaluasi Context (Konteks kebutuhan & pemahaman)

Evaluasi konteks bertujuan untuk menilai kebutuhan nyata tentang Standar Akuntansi Keuangan EMKM bagi pelaku UMKM serta menilai kesesuaian dengan kondisi lingkungan usaha. Dari hasil Cross-Case synthesis (Pengelompokkan tema lintas kasus) ditemukan tema utama yang berulang: "*Kesadaran pentingnya pencatatan*" yang di sampaikan oleh hampir semua narasumber menilai pencatatan vital yang berguna untuk memantau laba/rugi usaha, laporan arus kas, dan mengetahui stok persediaan barang serta kebutuhan dalam keputusan berusaha. Tema berulang berikutnya mengenai "*Pengetahuan SAK EMKM*" yang disampaikan oleh narasumber dengan tanggapan mulai dari belum pernah dengar, pernah dengar sekilas hingga memahami komponen dasar. Sedangkan tema berulang "*Motivasi adopsi standar*" ditanggapi positif, terutama ketika dikaitkan dengan profesionalisme, akses pembiayaan dan kredibilitas terhadap investor.

Berikut beberapa kutipan representatif hasil rekaman wawancara yang telah ditranskrip "*Penting sekali... tanpa catatan kami tidak tahu posisi usaha, untung atau rugi.*"

*"Butuh standar agar laporan rapi dan bisa dibandingkan."*

*"Belum pernah dengar SAK EMKM, tapi kalau ada pendampingan, siap belajar."*

Sebanyak 24 UMKM belum pernah mendengar istilah SAK EMKM, sementara 6 UMKM mengetahui dari kuliah atau media. Namun, semua responden menekankan pentingnya pencatatan keuangan untuk memantau laba-rugi, arus kas, dan stok.

- Evaluasi Input (Sumber daya & dukungan):

Evaluasi Input bertujuan untuk menilai kesiapan infrastruktur pendukung program pengimplementasian SAK EMKM pada UMKM kota Pekanbaru

Dari hasil Cross-Case synthesis (Pengelompokkan tema lintas kasus) ditemukan tema utama yang berulang "*SDM keuangan*": Mayoritas UMKM dikelola langsung oleh pemilik dan sebagian memiliki admin/staf keuangan, sedangkan yang memiliki tim akuntansi yang terpisah (contoh: entitas yang menyebutkan sistem internal "*Akosis*") sangat sedikit. Selanjutnya "*Pelatihan & dukungan eksternal*". Responden menyampaikan umumnya belum memperoleh pelatihan formal SAK EMKM, dari segi informasi pelatihan melalui dinas/BI/ asosiasi belum merata terakses. Tema utama yang berulang berikutnya yaitu "*Perangkat & aplikasi*" responden memberikan tanggapan bervariasi, sebagian mengatakan masih dilakukan secara manual/tulis tangan, menggunakan Excel/Spreadsheet, hingga aplikasi seperti *point/retail/F&B* (mis. Olsera, MOCA, Luna, Managerio) dan aplikasi akuntansi (Kledo). Aplikasi SiApik (BI) sering muncul sebagai potensi solusi bebas biaya.

Untuk tema berulang “*Akses & tata kelola*” beberapa kasus menyebut akses aplikasi terpusat di pemilik, sehingga transparansi & *hand-over* tugas terbatas.

Mayoritas pelaku UMKM (21 UMKM) mencatat langsung oleh pemilik dan hanya beberapa yang memiliki staf keuangan (9 UMKM). Hal ini menunjukkan ketergantungan penuh pada pemilik, sehingga pencatatan tidak berkelanjutan jika pemilik sibuk. Selanjutnya, pelatihan formal Akuntansi (SAK EMKM) belum pernah diikuti oleh sebagian besar UMKM, sehingga transfer pengetahuan terhadap pemahaman SAK EMKM menjadi rendah yang mengakibatkan potensi kegagalan implementasi penggunaan standar penyusunan laporan keuangan yang tinggi. Dari sisi perangkat, 15 UMKM masih menggunakan catatan manual, 11 UMKM menggunakan *software* excel, dan 4 UMKM mencoba menggunakan aplikasi digital. Sebagian besar UMKM melakukan pencatatan manual yang cenderung memiliki risiko tinggi terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan bukti transaksi, serta inkonsistensi format laporan, sehingga menyulitkan penerapan prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan keberhasilan implementasi SAK EMKM masih relatif rendah

- *Process* (Pelaksanaan & hambatan):

Evaluasi proses lebih difokuskan pada pelaksanaan program implementasi SAK EMKM pada UMKM Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui tantangan yang dihadapi untuk penerapan penyusunan SAK EMKM.

Dari hasil Cross-Case synthesis (Pengelompokan tema lintas kasus) ditemukan tema utama yang berulang yakni “*Format pencatatan*” Informan menjelaskan format yang digunakan adalah dari jurnal sederhana (tanggal–keterangan–debit–kredit), buku kas harian, hingga *cash/stock* rekap harian untuk F&B/ritel. Tema ulang berikutnya yaitu “*Hambatan*” menurut informan hambatan berupa Bukti transaksi tidak lengkap/hilang, nota tanpa tanggal, atau lupa input saat *rush hour*, Pengelompokan akun belum rapi (biaya operasional bercampur; belum ada pemisahan modal dengan keuangan pribadi). Tema berulang “*Pendampingan*” mendapat respon secara mayoritas belum pernah mendapatkan pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM dan beberapa menyebutkan mendapatkan *coaching* internal (dari admin sebelumnya/pimpinan).

Temuan utama yang menjadi hambatan adalah nota hilang atau nota tidak lengkap (18 UMKM). Hal ini bertentangan dengan prinsip *Reability* dan *Verifiability* dalam kerangka konseptual IFRS. *Reliability* merujuk pada kemampuan informasi keuangan untuk dipercaya karena merepresentasikan kondisi ekonomi secara jujur, lengkap, dan bebas dari kesalahan material. Sementara itu, *verifiability* mengacu pada kemampuan informasi keuangan untuk diuji dan dikonfirmasi oleh pihak independen melalui bukti pendukung yang memadai, sehingga menghasilkan kesimpulan yang konsisten (IASB, 2018). Ketiadaan atau ketidaklengkapan bukti transaksi menyebabkan pencatatan keuangan tidak dapat diverifikasi dan mengurangi tingkat keandalan informasi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan maupun sebagai prasyarat penerapan SAK EMKM.

Hambatan berikutnya adalah belum pernah mendapat pendampingan SAK EMKM (28 UMKM). Ketiadaan pendampingan menyebabkan tidak adanya *Corrective Feedback loop* sehingga proses adopsi tidak dapat berkembang dari pencatatan manual menjadi laporan berbasis standar. Format laporan yang belum sesuai dengan standar menjadi temuan hambatan berikutnya. (21 UMKM). Karakteristik kualitatif laporan keuangan harus dapat diperbandingkan dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Namun faktanya dilapangan karakteristik ini tidak dapat dipenuhi oleh pelaku UMKM, serta keterbatasan waktu/SDM (12 UMKM).

- *Product* (Hasil & dampak)

Evaluasi Produk dilakukan untuk melihat dampak positif dari penggunaan SAK EMKM yang dihasilkan dari pelaporan keuangan dan pertumbuhan UMKM.

Dari hasil Cross-Case synthesis (Pengelompokan tema lintas kasus) ditemukan tema utama yang berulang yakni “*Dampak internal jelas*”: Informan menyebutkan adanya dampak positif bagi UMKM ketika menggunakan laporan keuangan sesuai standar yaitu keteraturan administrasi meningkat, visibilitas arus kas, perencanaan (HPP, stok musiman, promosi) lebih terarah. Tema utama berulang berikutnya “*Pemanfaatan eksternal*”: sebagian informan telah menggunakan laporan keuangan untuk pembiayaan (contoh beberapa kasus menyebut bank/koperasi); sebagian besar belum bahkan tidak pernah. Tema berulang tentang “*Komitmen ke depan*” banyak informan yang menyatakan siap menerapkan SAK EMKM jika ada pelatihan/pendampingan; sebagian kecil menyatakan “pencatatan sederhana sudah cukup”.

Sebanyak 12 UMKM telah memiliki laporan sederhana, dan 5 di antaranya memanfaatkannya untuk pembiayaan (bank/koperasi). Dampak yang dilaporkan adalah kemudahan memantau arus kas (15 UMKM), kejelasan laba-rugi (10 UMKM), serta dukungan pengambilan keputusan usaha (5 UMKM). Hampir semua (28 UMKM) siap mengadopsi SAK EMKM jika ada pendampingan

**Table 1: Rekapitulasi Temuan Lintas-Kasus SAK EMKM UMKM Pekanbaru**

No	Komponen	Temuan Utama	Jumlah UMKM (n=30)
1	Context	Belum tahu SAK EMKM	24
		Tahu dari kuliah/media	6
2	Input	Menganggap laporan penting	30
		Ada staf keuangan	9
		Owner mencatat sendiri	21
		Pernah pelatihan	3
		Dukungan eksternal	2
		Catatan manual	15
		Excel	11
		Aplikasi digital	4
3	Process	Belum pernah pendampingan SAK EMKM	28
		Lupa/nota hilang	18
		Format belum standar	21
		Kekurangan waktu/SDM	12
		Ingin pelatihan/aplikasi	25
4	Product	Sudah ada laporan sederhana	12
		Dipakai pembiayaan	5
		Dampak positif nyata	20
		Bersedia adopsi SAK EMKM	28

Sumber: Data Primer Penelitian (2025).

## SIMPULAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa implementasi **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)** pada UMKM di Kota Pekanbaru masih menghadapi dilema klasik antara tingginya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya pencatatan keuangan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkannya. Melalui pendekatan evaluasi model **CIPP (Context, Input, Process, Product)**, ditemukan bahwa pada aspek **context**, para pelaku UMKM memiliki kesadaran tinggi mengenai urgensi pencatatan sebagai instrumen vital dalam memantau kinerja usaha, mengendalikan arus kas, serta

mendukung strategi bisnis. Namun, pengetahuan formal tentang SAK EMKM masih rendah, di mana sebagian besar pelaku usaha bahkan belum pernah mendengar istilah tersebut.

Pada aspek **input**, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, dan terbatasnya infrastruktur pencatatan menjadi kendala utama. Mayoritas UMKM masih mengandalkan pencatatan manual yang dilakukan langsung oleh pemilik, hanya sebagian kecil yang melibatkan staf keuangan atau menggunakan aplikasi digital. Pada aspek **process**, praktik pencatatan yang berlangsung cenderung tradisional dengan hambatan teknis seperti bukti transaksi yang hilang, format laporan yang tidak standar, dan pencampuran modal pribadi dengan keuangan usaha. Hampir seluruh UMKM juga belum pernah memperoleh pendampingan khusus terkait penerapan SAK EMKM, sehingga proses adopsi berjalan lambat dan parsial.

Meskipun demikian, pada aspek **product**, ditemukan dampak positif yang mendorong optimisme. UMKM yang telah mencoba menyusun laporan sederhana merasakan manfaat nyata berupa meningkatnya keteraturan administrasi, kemudahan dalam memantau arus kas, dan dukungan bagi pengambilan keputusan strategis. Beberapa bahkan telah memanfaatkan laporan tersebut untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Fakta ini menunjukkan bahwa meski implementasi SAK EMKM masih terbatas, potensi manfaatnya sudah mulai dirasakan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi adopsi SAK EMKM di kalangan UMKM Pekanbaru cukup tinggi, **namun** keterbatasan sumber daya, minimnya pendampingan, dan absennya mekanisme evaluasi berkelanjutan masih menjadi penghambat. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, program pendampingan harus dilakukan secara intensif dan berjenjang, bukan sekadar sosialisasi sekali jalan. Siklus pelatihan–pendampingan–evaluasi perlu dibangun agar UMKM dapat menginternalisasi standar akuntansi dalam operasional sehari-hari. Kedua, digitalisasi dapat berfungsi sebagai akselerator dengan menghadirkan aplikasi akuntansi yang ramah pengguna, terintegrasi dengan SAK EMKM, dan dapat diakses tanpa biaya tinggi. Ketiga, kolaborasi lintas aktor harus diperkuat, di mana universitas dapat menjadi pusat pendampingan, pemerintah menyediakan dukungan regulasi, asosiasi profesi menjaga kualitas penerapan, dan lembaga keuangan memberi insentif nyata bagi UMKM yang konsisten menggunakan laporan keuangan berbasis standar. Keempat, mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan harus dibangun untuk memastikan bahwa penerapan SAK EMKM tidak hanya menghasilkan laporan keuangan formal, tetapi juga berdampak pada peningkatan akses pembiayaan, pengambilan keputusan berbasis data, serta daya saing UMKM di pasar formal.

## **SARAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi standar akuntansi masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait keterbatasan pengetahuan, minimnya infrastruktur pencatatan, serta absennya pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian langkah strategis untuk memperkuat penerapan standar ini di lapangan. Pemerintah daerah dan lembaga terkait disarankan membangun mekanisme pendampingan yang bersifat terstruktur dan berjenjang, serta berkelanjutan. Di sisi praktis, pelaku UMKM diharapkan meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam menerapkan pencatatan keuangan formal. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan efektivitas model pendampingan yang paling relevan bagi UMKM di berbagai sektor usaha. Selain itu, studi komparatif antar kota atau antar jenis usaha akan memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan adopsi standar akuntansi di lingkungan UMKM.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alkin, M. C., & Vo, A. T. (2018). *Evaluation essentials: From A to Z* (2nd ed.). New York: Guilford Press.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2010). *Evaluasi program pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arlita, D., et al. (2023). Analisis penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah pada UMKM Warung Sarapan Pagi Supiah Kecamatan Limapuluh Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi*.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. (2022). *Laporan tahunan dinas koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Gugiu, C. P., & Rodriguez-Campos, L. (2020). Evaluation frameworks: Synthesizing approaches to evaluation. *Evaluation and Program Planning*, 79, 101789. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2019.101789>
- IAI. (2016). *Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- International Accounting Standards Board (IASB). (2018). *Conceptual Framework for Financial Reporting*. London: IFRS Foundation.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Laporan tahunan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). *Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 99 Tahun 2022 tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah*. Jakarta: Kemenkop UKM
- Khadijah, K., & Purba, N. M. B. (2021). Analisis pengelolaan keuangan pada usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Batam. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 5(1), 123–134
- Khaidir, M. (2021). Penerapan SAK EMKM pada UMKM Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 9(2), 77–88.
- Mark, M. M., Henry, G. T., & Julnes, G. (2000). *Evaluation: An integrated framework for understanding, guiding, and improving policies and programs*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pakaya, S., et al. (2024). Implementasi SAK EMKM pada UMKM Gorontalo: Dampak terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 6(1), 55–70.
- Pangestu, A., et al. (2019). Kesesuaian implementasi SAK EMKM di kalangan UMKM Samarinda. *Jurnal Akuntansi Mulawarman*, 14(2), 120–135.
- Rohmannisa, D. (2024). Praktik pencatatan keuangan informal pada UMKM Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Riau*, 15(1), 99–112.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2019). *Evaluation: A systematic approach* (8th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP model for evaluation. In T. Kellaghan & D. L. Stufflebeam (Eds.), *International handbook of educational evaluation* (pp. 31–62). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation theory, models, and applications*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. (2019). *Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. Jakarta: LP3ES.